



## PENGARUH UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI KOTA SEMARANG TAHUN 2017 – 2023

**Muhamad Rifky Nurfardhan<sup>1</sup>, Ryan Achmad Firdaus<sup>2</sup>, Yoga Prastiya<sup>3</sup>, Ridho Putra  
Wibowo<sup>4</sup>, Nina Farliana<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Pendidikan Ekonomi , Universitas Negeri Semarang

[fardan27@students.unnes.ac.id](mailto:fardan27@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>

[riyanahmadfirdaus102@students.unnes.ac.id](mailto:riyanahmadfirdaus102@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>

[yogaprs22@students.unnes.ac.id](mailto:yogaprs22@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>

[ridhoptrw@students.unnes.ac.id](mailto:ridhoptrw@students.unnes.ac.id)<sup>4</sup>

[ninafarliana@mail.unnes.ac.id](mailto:ninafarliana@mail.unnes.ac.id)<sup>5</sup>

### **Abstract**

The increase in the Regional Minimum Wage (UMK) is one of the labor policies aimed at improving workers' welfare by guaranteeing a minimum income standard. However, this policy can also have economic consequences, particularly on the unemployment rate, if it is not balanced with stable economic growth and increased job creation. In the context of Semarang, which is one of the economic growth centers in Central Java, the minimum wage policy can significantly impact the labor market. Therefore, this study aims to analyze the effect of UMK on the unemployment rate in Semarang during the period of 2017-2023. This research uses a quantitative method with linear regression to analyze the relationship between UMK and the unemployment rate. Data on the Regional Minimum Wage (UMK) is obtained from the Semarang City Manpower Office, while data on the Open Unemployment Rate (TPT) is sourced from the Central Statistics Agency (BPS) of Semarang. This study provides insights for local governments and policymakers in formulating more effective labor strategies, taking into account the balance between workers' welfare and the sustainability of businesses. It is hoped that future UMK policies can be designed more holistically, considering broader economic and social factors.

**Keywords:** Regional Minimum Wage, Unemployment Rate, Labor Policy, Economic Growth, Semarang City

### **Abstrak**

Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) merupakan salah satu kebijakan ketenagakerjaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan menjamin standar penghasilan minimum. Namun, kebijakan ini juga dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi, terutama terhadap tingkat pengangguran, apabila tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peningkatan penciptaan lapangan kerja. Dalam konteks Kota Semarang, yang merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, kebijakan upah minimum dapat berdampak signifikan terhadap pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh UMK terhadap tingkat pengangguran di Kota Semarang selama periode 2017-2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode regresi linear untuk menganalisis hubungan antara UMK dan tingkat pengangguran. Data Upah Minimum Kota (UMK) diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, sementara data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang. Penelitian ini memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi ketenagakerjaan yang lebih efektif, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Diharapkan, kebijakan UMK yang diterapkan di masa depan dapat dirancang secara lebih holistik dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial yang lebih luas.

**Kata Kunci:** Upah Minimum Kota, Tingkat Pengangguran, Kebijakan Ketenagakerjaan, Pertumbuhan Ekonomi, Kota Semarang

### **PENDAHULUAN**

Pengangguran merupakan salah satu isu krusial dalam perekonomian yang dapat berdampak luas pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terjadi ketika seseorang dalam usia kerja tidak memiliki pekerjaan dan sedang berusaha mencari pekerjaan (Badan Pusat Statistik, 2023). Tingginya tingkat pengangguran dapat menjadi indikator ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja. Kondisi ini juga dapat menyebabkan berbagai permasalahan sosial, seperti meningkatnya angka kemiskinan, ketimpangan pendapatan, serta berkurangnya daya beli masyarakat yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi tingkat pengangguran adalah kebijakan upah minimum yang ditetapkan oleh



pemerintah. Upah Minimum Kota (UMK) diatur sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja dan untuk memastikan standar hidup yang layak. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja serta mengurangi ketimpangan ekonomi (Mankiw, 2016). Namun, kebijakan ini juga dapat membawa dampak negatif bagi pasar tenaga kerja apabila kenaikan upah tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam merekrut tenaga kerja. Kenaikan upah dapat meningkatkan biaya tenaga kerja, yang pada akhirnya dapat menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau beralih ke otomatisasi dalam produksi (Card & Krueger, 1994). Di sisi lain, jika kenaikan upah minimum disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peningkatan produktivitas, maka dampak negatif terhadap pengangguran dapat diminimalkan.

Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan salah satu pusat ekonomi terbesar di Indonesia, mengalami dinamika ketenagakerjaan yang cukup kompleks. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran di Kota Semarang mengalami perubahan signifikan seiring dengan penyesuaian UMK yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam periode 2017-2023, UMK Kota Semarang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Namun, belum ada kajian mendalam yang menganalisis bagaimana kebijakan UMK ini berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di kota tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami dampak kebijakan upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Kota Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara UMK dan tingkat pengangguran di Kota Semarang dalam periode 2017-2023. Dengan menggunakan metode kuantitatif melalui metode regresi linear, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan dalam merancang strategi ketenagakerjaan yang lebih efektif. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan pengambil kebijakan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan UMK agar lebih seimbang antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data sekunder untuk menguji pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Kota Semarang periode 2017-2023. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang berupa data Upah Minimum Kota (UMK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),

serta dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang berupa laporan tahunan kebijakan upah dan ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan dua variabel utama, yaitu Upah Minimum Kota (UMK) Semarang sebagai variabel independen (X) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai variabel dependen (Y).w

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana dengan model  $Y = a + bX + e$ , di mana Y adalah Tingkat Pengangguran, X adalah Upah Minimum Kota, a adalah konstanta, dan b adalah koefisien regresi. Tahapan analisis data meliputi uji deskriptif untuk melihat tren upah minimum dan pengangguran, uji asumsi klasik (uji normalitas dan uji multikolinieritas) untuk memastikan kelayakan model regresi, serta uji statistik berupa uji t untuk melihat signifikansi pengaruh variabel upah minimum terhadap pengangguran dan uji F untuk menguji model regresi secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antara upah minimum dan tingkat pengangguran di Kota Semarang yang dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Data Pengangguran

Tahun	Jumlah Pengangguran (dalam persen)
2017	6,61
2018	5,29
2019	4,54
2020	9,57
2021	9,54
2022	7,60
2023	5,99

Sumber: BPS Kota Semarang 2017-2023

Tabel 2. Data Upah Minimum

Tahun	Upah Minimum Kerja (Perbulan)
2017	2.125.000
2018	2.310.087
2019	2.498.587
2020	2.715.000
2021	2.810.025

2022	2.835.021
2023	3.060.348

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang 2017-2023

### Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, diperoleh gambaran karakteristik data penelitian sebagai berikut:

Tabel 3. Tabel hasil deskriptif statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
UMK	7	2125000.00	3060348.78	2622010.014	326868.7729
TPT	7	4.54	9.57	7.0200	1.98165

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Tabel 4. Tabel Uji Normalitas

Test Statistic	.183	.184
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 <sup>c,d</sup>	.200 <sup>c,d</sup>

#### Interpretasi Uji Normalitas

Dari hasil uji normalitas, diperoleh nilai Asymp. Sig. sebesar 0.200, yang lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  gagal ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal.

#### Uji Multikolinieritas

Coefficients <sup>a</sup>								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model							Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.161	6.652		.175	.868		
	UMK	2.235E-6	.000	.369	.887	.416	1.000	1.000

a. Dependent Variable: TPT

Interpretasi Hasil Uji Regresi Sederhana dan Multikolinearitas :

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana yang ditampilkan dalam tabel "Coefficients", penelitian ini menguji hubungan antara variabel independen Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan variabel dependen Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berikut adalah interpretasi dari hasil yang diperoleh:

#### 1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan yang sangat kuat antar variabel independen yang dapat mengganggu hasil analisis regresi. Berdasarkan hasil pada tabel, nilai Tolerance sebesar 1.000 dan Variance Inflation Factor (VIF) juga 1.000, yang menunjukkan tidak adanya masalah multikolinearitas dalam model regresi ini. Nilai Tolerance yang mendekati 1 dan VIF yang berada di bawah 10 menegaskan bahwa variabel independen dalam model ini tidak berkorelasi tinggi satu sama lain.

#### 2. Koefisien Regresi

Konstanta (Intercept) memiliki nilai 1.161 dengan standar error 6.652. Ini berarti bahwa jika variabel independen (UMK) bernilai nol, maka nilai TPT diperkirakan sebesar 1.161.

Koefisien UMK sebesar 2.235E-6, yang berarti bahwa setiap peningkatan UMK sebesar satu unit akan meningkatkan TPT sebesar 2.235E-6 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.

#### 3. Uji Signifikansi

Nilai t hitung untuk UMK sebesar 0.887 dengan tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 0.416. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka koefisien UMK tidak signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel TPT. Ini menunjukkan bahwa secara statistik, UMK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka dalam model yang digunakan.

#### Analisis Regresi Sederhana

Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	1.161	6.652	
				t
				.175

UMK	2.235E-6	.000	.369	.887
-----	----------	------	------	------

Interpretasi Hasil Analisis Regresi Sederhana :

Analisis regresi sederhana dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap variabel dependen Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Hasil regresi yang ditampilkan dalam tabel menunjukkan beberapa indikator penting yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Koefisien Regresi

Konstanta (Intercept) bernilai 1.161 dengan standar error 6.652. Ini berarti bahwa jika nilai UMK adalah nol, maka nilai TPT diperkirakan sebesar 1.161.

Koefisien UMK sebesar 2.235E-6, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan UMK sebesar 1 satuan akan meningkatkan TPT sebesar 2.235E-6, dengan asumsi faktor lainnya tetap konstan.

2. Nilai Standardized Coefficients (Beta)

Nilai Beta untuk variabel UMK sebesar 0.369, yang menunjukkan bahwa UMK memiliki hubungan positif dengan TPT. Namun, besarnya pengaruh UMK terhadap TPT relatif kecil dalam skala standar.

3. Uji Signifikansi (t-test)

Nilai t-hitung untuk variabel UMK adalah 0.887.

Nilai signifikansi (Sig.) tidak terlihat dalam gambar, tetapi dari nilai t-hitung yang kecil, dapat diasumsikan bahwa variabel UMK tidak signifikan dalam mempengaruhi TPT pada tingkat kepercayaan 95% (jika p-value lebih besar dari 0.05).

**Uji t-Statistik**

Uji t merupakan salah satu metode dalam analisis regresi yang digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dalam konteks ini, uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Berdasarkan hasil yang diperoleh:

1. Nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel UMK adalah 0.416 (lebih besar dari 0.05), sehingga  $H_0$  gagal ditolak. Ini berarti UMK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap TPT.
2. Nilai t-hitung sebesar 0.887, yang relatif kecil, menunjukkan bahwa variabel UMK tidak cukup kuat dalam menjelaskan perubahan variabel TPT.
3. Untuk konstanta, nilai Sig. = 0.868, yang jauh di atas 0.05,



mengindikasikan bahwa konstanta juga tidak signifikan dalam model ini.

### **Uji f-Statistik**

#### **Interpretasi Uji F**

Uji F dalam analisis regresi digunakan untuk menguji signifikansi model regresi secara keseluruhan. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Dari hasil yang diperoleh:

1. Nilai Sig. sebesar 0.416 lebih besar dari 0.05, sehingga  $H_0$  gagal ditolak. Ini berarti bahwa model regresi secara keseluruhan tidak signifikan dalam menjelaskan variabel dependen (TPT).
2. Nilai F-hitung sebesar 0.786, yang relatif kecil, menunjukkan bahwa variabel independen (UMK) tidak cukup kuat dalam menjelaskan variasi variabel dependen (TPT).

#### **Tren UMK dan TPT di Kota Semarang (2017–2023)**

Kota Semarang, sebagai pusat ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, menerapkan kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) setiap tahunnya sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja. Dalam periode penelitian (2017–2023), terjadi kenaikan UMK secara konsisten dari Rp2.125.000 (2017) menjadi Rp3.060.348 (2023), mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup pekerja.

Namun, peningkatan UMK ini tidak selalu seiring dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Data menunjukkan bahwa TPT mengalami fluktuasi: dari 6,61% (2017) turun menjadi 4,54% (2019), tetapi melonjak drastis menjadi 9,57% pada tahun 2020, yang bertepatan dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian lokal dan nasional. Meskipun setelah pandemi TPT mulai menurun kembali, angka ini menunjukkan bahwa faktor-faktor eksternal seperti krisis kesehatan global dapat menjadi variabel dominan yang memengaruhi pasar tenaga kerja, terlepas dari kebijakan upah minimum.

#### **Hubungan antara UMK dan TPT: Analisis Statistik**

Berdasarkan hasil regresi linear sederhana, hubungan antara UMK sebagai variabel independen dan TPT sebagai variabel dependen ditemukan tidak signifikan secara statistik. Koefisien regresi sebesar  $2.235E-6$  mengindikasikan bahwa setiap kenaikan UMK sebesar Rp1 akan menaikkan TPT sebesar 0.000002235 poin. Meski arah hubungan ini positif, nilai pengaruhnya sangat kecil dan tidak signifikan ( $p\text{-value} = 0.416 > 0.05$ ).

Hasil ini memperkuat temuan bahwa kebijakan UMK tidak secara langsung memengaruhi tingkat pengangguran di Kota Semarang, atau bahwa pengaruhnya ditutupi oleh faktor-faktor lain yang lebih kuat, seperti



kondisi ekonomi makro, iklim investasi, produktivitas tenaga kerja, dan dinamika pasar tenaga kerja informal.

### **Interpretasi Ekonomi dari Hasil Statistik**

Secara teori ekonomi, kenaikan upah minimum dapat menyebabkan dua hal yang saling bertentangan:

1. Efek positif: Meningkatkan daya beli pekerja, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki standar hidup. Dalam jangka panjang, konsumsi yang lebih tinggi dapat mendorong permintaan barang dan jasa, menciptakan peluang kerja baru.
2. Efek negatif: Beban biaya tambahan bagi perusahaan, terutama UMKM. Jika kenaikan upah tidak diiringi oleh kenaikan produktivitas, perusahaan mungkin mengurangi jumlah tenaga kerja atau bahkan tutup, yang justru meningkatkan pengangguran.

Dalam konteks Kota Semarang, pengaruh UMK terhadap pengangguran lebih cenderung netral atau lemah, sebagaimana ditunjukkan oleh analisis regresi. Ini dapat terjadi karena:

1. Struktur ekonomi Semarang yang beragam, di mana sektor informal masih memainkan peran besar. Banyak pekerja informal tidak terikat langsung dengan kebijakan UMK.
2. Fleksibilitas pasar tenaga kerja, di mana perusahaan lebih cepat menyesuaikan diri dengan regulasi baru tanpa harus melakukan PHK massal.
3. Peningkatan UMK yang masih dalam batas wajar sehingga belum memberikan tekanan ekstrem pada sektor usaha.

### **Dampak Pandemi COVID-19 sebagai Variabel Intervening**

Kenaikan tajam TPT pada tahun 2020 dan 2021 menjadi anomali dalam tren data, yang kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi COVID-19. Banyak usaha tutup atau mengurangi operasional, terutama di sektor pariwisata, transportasi, dan perdagangan, yang merupakan sektor padat karya. Oleh karena itu, lonjakan pengangguran pada periode ini tidak bisa sepenuhnya dikaitkan dengan kebijakan UMK, melainkan oleh kondisi ekonomi eksternal yang bersifat darurat.

Dalam situasi seperti ini, efektivitas UMK sebagai instrumen kebijakan ketenagakerjaan menjadi terbatas, karena isu utama bukanlah tingginya atau rendahnya upah, tetapi ketersediaan lapangan kerja itu sendiri.

### **Implikasi Kebijakan**

Temuan bahwa UMK tidak berpengaruh signifikan terhadap TPT memberikan beberapa catatan penting bagi perumus kebijakan:

1. UMK bukan satu-satunya solusi untuk pengangguran. Pemerintah perlu mengembangkan pendekatan yang lebih

- holistik, termasuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor padat karya dan menciptakan iklim investasi yang ramah bisnis.
2. Perlu integrasi antara kebijakan upah dan produktivitas. Kenaikan UMK seharusnya diikuti oleh strategi peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan vokasional, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelatihan digitalisasi.
  3. Diversifikasi ekonomi daerah menjadi sangat penting agar tidak terlalu bergantung pada sektor-sektor tertentu saja. Sektor seperti teknologi informasi, kesehatan, dan industri kreatif perlu didorong agar menyerap lebih banyak tenaga kerja muda dan terampil.
  4. Monitoring dan evaluasi rutin kebijakan UMK diperlukan agar kebijakan upah tetap relevan dengan kondisi pasar kerja dan dunia usaha. Pendekatan berbasis data dan partisipatif akan meningkatkan efektivitas kebijakan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Kota (UMK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Semarang selama periode 2017-2023. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa meskipun UMK mengalami peningkatan signifikan setiap tahun, dampaknya terhadap TPT tidak menunjukkan hasil yang signifikan secara statistik. Nilai koefisien regresi yang diperoleh menunjukkan bahwa setiap kenaikan UMK hanya memberikan pengaruh yang sangat kecil terhadap penurunan tingkat pengangguran, dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel UMK tidak cukup kuat dalam mempengaruhi TPT dalam konteks model yang digunakan.

Meskipun tujuan utama dari kebijakan UMK adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan menjamin standar penghasilan minimum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan UMK tanpa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan penciptaan lapangan kerja yang memadai dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti peningkatan pengangguran. Dengan kata lain, meskipun UMK bertujuan baik, keberhasilannya dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak masih perlu dipertanyakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiansyah, F., & Maruf, A. (2021). Analisis Pengaruh Inflasi, PDRB, UMK, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran di Jawa Tengah Tahun 2013-2019. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*

- Pembangunan, 10(1), 62-78.
- Afrida, B. R. (2023). *Ekonomi Sumber Daya Manusia: Teori dan Aplikasi* (3rd ed.). Ghalia Indonesia.
- Alfian, L. (2023). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2021* [Doctoral dissertation]. Universitas Islam Indonesia.
- Ashari, R. T., & Athoillah, M. (2023). Analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di kawasan tapal kuda. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2), 313–326.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Pengangguran Terbuka di Indonesia*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Cahyono, E., & Handayani, H. R. (2022). Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Semarang. *Diponegoro Journal of Economics*, 11(2), 134-147.
- Card, D., & Krueger, A. B. (1994). Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania. *American Economic Review*, 84(4), 772–793.
- Dewi, P. A. K., & Sutrisna, I. K. (2021). Pengaruh Upah Minimum, PDRB, dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 10(8), 2817-2847.
- Fatimah, S., & Utomo, Y. P. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja, Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri, Proporsi PDRB Sektor Industri, Proporsi PDRB Sektor Jasa Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3(3), 355–363.
- Hutagalung, P. S. P., & Tobing, D. S. K. (2023). Analisis Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Pulau Jawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(1), 14-29.
- Lisa, M. K., Vinsentia, K. B., & Octavia, A. N. (2024). DAMPAK UPAH MINIMUM DAN INFLASI TERHADAP PENGANGGURAN. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 3(3), 292–299.
- Mahendra, D. B., & Utomo, Y. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2017-2021. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 329–342.
- Mankiw, N. G. (2016). *Principles of Economics* (8th ed.). Cengage Learning.
- Nainggolan, O., & Putri, D. Z. (2022). Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja dan Penyerapan Tenaga Kerja: Studi

- Kasus Jawa Tengah. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 9(2), 121-138.
- Pratiwi, T. H., & Wijaya, R. S. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum Terhadap TPAK di Kota Semarang. *Jambura Economic Education Journal*, 6(2), 581–592.
- Pubra, A. D., & Abbas, T. (2024). PENGARUH PDRB, BELANJA DAERAH, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI SUMATERA UTARA. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 7(2), 49–60.
- Putra, R. E., & Sulistyaningrum, E. (2021). Analisis Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia: Pendekatan Regresi Data Panel. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 191-208.
- Putri, Y. E., & Soelistyo, A. (2023). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota-Kota Besar Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 23(1), 44-59.
- Rizkia, A., & Haryatiningsih, R. (2023). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik Kota Besar di Pulau Jawa. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 125–132.
- Sari, P. I. P., & Hasmarini, M. I. (2023). Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(1), 112–122.
- Setiawan, H., & Hakim, A. (2022). Kebijakan Upah Minimum di Era Ekonomi Digital: Tantangan dan Prospek Bagi Ketenagakerjaan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik*, 13(1), 87-102.
- Wijayanti, A., & Firmansyah, M. (2021). Pengaruh Upah Minimum, PDRB, dan Investasi Terhadap Pengangguran di Kawasan Metropolitan Jawa Tengah. *Economic Development Analysis Journal*, 10(3), 308-321.